



# RENCANA KERJA

# 2023



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2023.

Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan dengan meninjau hasil evaluasi pelaksanaan serta capaian kinerja pada Renja Diskominfo-SP sebelumnya. Penyusunan Renja Diskominfo-SP Prov. Sulsel bertujuan dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan urusan Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan dalam rangka perbaikan terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2023.



## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGAKAT DAERAH TAHUN 2021</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RPD Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2022 .....	6
2.2 Analis kinerja pelayanan perangkat daerah.....	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	43
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>53</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadisatu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan Renja tahun terakhir dari Renstra 2018 – 2023.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

- o. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
- p. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang SulSel SatuData;
- q. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan rencana kerja ini adalah :

- 1. Untuk menjabarkan Renstra Perangkat Daerah untuk pemenuhan target Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- 2. Merumuskan tujuan, sasaran, program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, dan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 3. Menyelaraskan rencana strategis daerah dengan Renja Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dibuatnya Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan adalah:

- 1. Sebagai pengendali kegiatan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategis, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
- 2. Tercapaiannya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
- 3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan indikator capaian;
- 4. Sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dan sebagai dasar penyusunan RKA tahun 2023;
- 5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

## 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

**Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;

4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil penggerjaan Tabel T-C.33.

## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022**

##### **2.1.1 Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021**

Dalam rangka meningkatkan kualitas Penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik, efektif dan akuntabel, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menjadi refrensi dalam melakukan langkah-langkah perbaikan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kabijakan Perencanaan Pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021 yang meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan dengan baik dan telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Alokasi anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 37.879.934.437,00 dengan realisasi keuangan. Rp. 36.369.259.370,00 atau 96,01 % dan realisasi fisik 100% dengan jumlah 5 Program, 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

## **1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaian kinerjanya tidak memenuhi target, yaitu:

### **A. Proram Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, dengan alokasi anggaran Rp. 245.746.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 216.044.000,00 atau sebesar 87,91%. Target sebesar 500 aspirasi/aduan namun yang tercapai hanya 86 aspirasi/pengaduan. Hal ini disebabkan oleh adanya aplikasi yang serupa yakni LAPOR SP4N dan rendahnya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Upaya yang akan dilakukan yaitu pengintegrasian aplikasi Baruga Pengaduan dengan aplikasi LAPOR SP4N serta intens melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.

### **B. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan alokasi anggaran Rp. 13.472.229.569,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.935.228.254,00 atau 96,01 %. Target nilai SPBE sebesar 3, hanya mencapai 2,05. Hal ini disebabkan oleh :

- Bertambahnya indikator penilaian SPBE sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Permenpan RB No 59 Tahun 2020;
- Provinsi Sulsel masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur SPBE;
- Provinsi Sulsel masih belum memiliki perencanaan strategis yang mengatur terkait SPBE.

Langkah-langkah pencapaian adalah pada tahun 2022 yaitu pelaksanaan kegiatan Pembuatan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sehingga diharapkan indeks penilaian tahun 2022 Pemprov Sulsel dapat meningkatkan indeks SPBE menjadi nilai (Baik), juga akan dilaksanakan Rencana Regulasi berupa Peraturan Pemerintah dengan berusaha menjalin kerja sama dengan Lembaga atau Perguruan Tinggi yang memiliki asesor TIK untuk melakukan rumusan regulasi SPBE dimaksud.

1) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan alokasi anggaran Rp. 642.190.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 639.120.000,00 atau sebesar 99,52 %. Target sebesar 14

kali mengikuti pengembangan TIK hanya tercapai 9 kali. Hal ini disebabkan oleh dibatasinya peserta dari Kementerian terkait. Upaya yang akan dilakukan yaitu menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait dan peningkatan pembiayaan SDM TIK.

## **2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 13.472.229.569,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.935.228.254,00 atau 96,01 %. Target program ini tercapai 100 %.

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 221.788.400,00 dengan realisasi Rp. 201.874.895,00 atau 91,02 %.
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp. 25.913.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 25.773.600,00 atau 99,46 % dengan capaian target 12 laporan.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp. 11.609.478189,00 dan realisasi sebesar Rp. 11.264.606.976,00 atau 97,03% dengan capaian target 100%.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan, alokasi anggaran Rp. 11.452.466.789,00 dan realisasi sebesar Rp. 11.124.792.576,00 atau 97,14% dengan capaian target 12 laporan
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, alokasi anggaran Rp. 157.011.400,00 dan realisasi sebesar Rp. 139.814.400,00 atau 89,05% dengan capaian target 15 laporan.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp. 852.057.300,00 dengan realisasi Rp. 736.189.648,00 atau 86,40% dengan capaian target 100%
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi anggaran Rp. 172.825.000,00 dengan realisasi Rp. 172.825.000,00 atau 100% dengan capaian target 3 unit.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, alokasi anggaran Rp. 788.905.680 dan realisasi Rp. 732.556.735,00 atau 92,86% dengan capaian target 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan, alokasi anggaran Rp. 330.776.512,00 dan alokasi anggaran Rp. 310.131.278 atau 93,76% dengan capaian target 21 unit.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi anggaran Rp. 320.890.418,00 dan realisasi Rp. 315.434.207,00 atau 98,30% dengan capaian target 1 unit.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi anggaran Rp. 137.238.750,00 dan realisasi Rp. 106.991.250,00 atau 77,96% dengan capaian target 59 unit.

## **B. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 19.005.445.732,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.097.178.598,00 atau 95,22%. Target pada indikator Persentase tindak lanjut pengaduan pada baruga layanan Masyarakat secara Elektronik tercapai 100% dan capaian indikator Kinerja pada tahun 2021 sebesar 80% Layanan Informasi dan Komunikasi Publik karena jumlah Kerjasama dalam hubungan layanan media mengalami peningkatan.

- 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, alokasi anggaran Rp. 19.005.445.732,00 dan realisasi Rp. 18.097.178.598,00 atau 95,22% dengan capaian target 1 dokumen.
  - Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah, alokasi anggaran Rp. 187.710.900,00 dan realisasi Rp. 138.307.900 atau 73,68% dengan capaian target sebesar 4 laporan;
  - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, alokasi anggaran Rp. 3.151.092.860,00 dan realisasi Rp. 2.885.346.427,00 atau 91,57% dengan capaian target sebesar 7 layanan informasi;
  - Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media, alokasi anggaran Rp. 7.037.491.600,00 dan realisasi Rp. 6.896.622.300,00 dengan capaian target sebesar 9 Media dan 50 advetorial;
  - Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, alokasi anggaran Rp. 1.900.215.712,00 dan realisasi Rp. 1.729.452.111,00 dengan

capaian target 80% dalam penyelesaian sengketa informasi.

### **C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, alokasi anggaran Rp. 663.008.300,00 dan realisasi Rp. 635.882.300,00 dengan capaian target cakupan ketersedian data statistik sektorl sebesar 80%.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi, alokasi anggaran Rp. 663.008.300,00 dan realisasi Rp. 635.882.300,00 atau 95,91% dengan capaian target persentase penyelenggaraan statistik sektorl sebesar 80%.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, alokasi anggaran Rp. 74.562.300,00 dan realisasi Rp. 70.557.300,00 atau 94,63% dengan capaian target hasil pengelolaan data statistik sektorl sebanyak 18 laporan;
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, alokasi anggaran Rp. 130.307.400,00 dan realisasi Rp. 117.325.400,00 atau 90,04% dengan capaian target hasil peningkatan kapasitas kelembagaan sebanyak 4 laporan;
  - Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur, alokasi anggaran Rp. 30.590.400,00 dan realisasi Rp. 30.590.400,00 atau 100% dengan capaian target sebanyak 1 aplikasi yang telah dikembangkan.

### **D. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, alokasi anggaran Rp. 425.747.100,00 dan realisasi 392.998.400,00 atau 92,31% dengan capaian target persentase komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian sebesar 100%.

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, alokasi anggaran sebesar Rp. 354.699.100,00 dan realisasi Rp. 326.841.400,00 atau 92,15% dengan capaian target sebanyak 6 (enam) area penyelenggaraan persandian.
  - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, alokasi anggaran Rp. 21.235.400,00 dan realisasi Rp. 18.207.700,00 atau 85,74% dengan capaian target 1 usulan rancangan Perda terkait sistem manajemen keamanan informasi;

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, alokasi anggaran Rp. 142.973.700,00 dan realisasi Rp. 129.133.700,00 atau 90,32% dengan capaian target 5 orang yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan 100 orang peserta forum komunikasi persandian;
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, alokasi anggaran Rp. 67.470.000,00 dan realisasi Rp. 61.260.000,00 atau 90,80% dengan capaian target 2 laporan hasil audit keamanan informasi;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, alokasi anggaran Rp. 123.020.000,00 dan realisasi Rp. 118.240.000,00 atau 96,11% dengan capaian target 6 layanan keamanan informasi yang diterapkan.
- 2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi alokasi anggaran Rp. 71.048.000,00 dan realisasi Rp. 66.157.000,00 atau 93,12% dengan capaian target 60% pada persentase keterhubungan daerah dalam jaring komunikasi sandi.
- Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, alokasi anggaran Rp. Rp. 71.048.000,00 dan realisasi Rp. 66.157.000,00 atau 93,12% dengan capaian target 3 jenis pada entitas jaringan komunikasi sandi;

## **E. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

- 1) Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, alokasi anggaran sebesar Rp. 4.313.503.736,00 dan realisasi Rp. 4.307.971.818,00 atau 99,87% dengan capaian target persentase pengelolaan e-government sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, alokasi anggaran Rp. 3.473.917.036,00 dan realisasi Rp. 3.473.908.556,00 atau 99,99% dengan capaian target 1.200 mbps pada kapasitas bandwith.

## **3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

## **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp. 195.874.800,00 dan realisasi Rp. 176.101.295,00 atau 89,91% dengan capaian sebanyak 9 (sembilan) dokumen dari 4 (empat) yang ditargetkan.
- 2) Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi anggaran Rp. 679.232.300,00 dan realisasi Rp. 563.364.648,00 atau 82,94% dengan capaian penyelenggaraan sebanyak 87 kali dari 60 kali target.

## **B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

- 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, alokasi anggaran Rp. 293.605.360,00 dan realisasi Rp. 292.093.960,00 atau 99,49% dan capaian sebanyak 1.120 konten dari 1.000 target konten;
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, alokasi anggaran Rp. 6.153.582.800,00 dan realisasi Rp. 5.939.311.900,00 atau 96,52 dengan capaian 15.473 berita dari 10.000 berita yang ditargetkan.

## **C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
  - Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, alokasi anggaran Rp. 137.321.200,00 dan realisasi Rp. 133.123.200,00 atau 96,94% dengan capaian peningkatan kapasitasn SDM sebanyak 16 orang dari 15 orang yang ditargetkan;
  - Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral, alokasi anggaran Rp. 290.227.000,00 dan realisasi Rp. 284.286.000,00 atau 97,95% dengan capaian 4 laporan peningkatan kapasitas dari 3 laporan yang ditargetkan.

## **D. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

- 1) Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
  - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, alokasi anggaran Rp. 197.396.700,00 dan realisasi Rp. 194.943.262,00 atau 98,76% dengan capaian sebanyak 86 aplikasi/web yang dibangun/dikembangkan dan dikelola dari 76 yang ditargetkan.

#### **4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan**

Faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan melampaui target kinerja program adalah :

- a. Adanya refocusing anggaran untuk mengatasi pandemic Covid-19;
- b. Bertambahnya indikator penilaian SPBE sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Permenpan RB No 59 Tahun 2020;
- c. Adanya aplikasi yang serupa Baruga Sulsel yakni LAPOR SPAN dan rendahnya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.

#### **5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Adanya Jumlah target yang tinggi dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan berimplikasi terhadap tidak tercapainya target kinerja sasaran dan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.

#### **6. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

- a. Hendaknya kegiatan yang tidak memenuhi target tetap diprioritaskan dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya;
- b. Perubahan target capaian kinerja di akhir periode Renstra;
- c. Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan.

#### **2.1.2 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk Triwulan II Tahun 2022**

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov Sulsel untuk 2022 terdiri dari 5 (Lima) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan. Pada Triwulan I evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.669.436.400,- realisasi sebesar Rp. 8.034868.311,- atau keuangan 54,77%;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.076.843.116,- realisasi sebesar Rp. 6.012.587.299,- atau keuangan 37,40% .

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.679.542.700,- realisasi sebesar Rp. 2.587.937.954,- atau keuangan 33,70%.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.630.052.412,- realisasi sebesar Rp. 447.745.005,- atau keuangan 27,47%.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 644.078.400,- realisasi sebesar Rp. 285.118.900,- atau keuangan 44,27% .

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target Program dan Kegiatan(Ren) a Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Target Capaian Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)			
					Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
1.0 10 01 01 2	10 00	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT (Prioritas)	% Penerapan e-Government pada lingkup Perangkat Daerah (Prioritas)	85 %	70,0				
1.0 10 01 02 2	10 00	Peningkatan Akses Internet Bandwidth	Jumlah Kapasitas Bandwidth Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahap I dan II	800 Mbps	600 Mbps				
1.0 10 01 03 2	10 00	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dan dikelola	35	114,0				
1.0 10 01 04 2	10 00	PROGRAM PENGEMBANGAN BARUGA LAYANAN PUBLIK (Prioritas)	%	100,0	100,0				
1.0 10 01 05 2	10 00	Pengembangan Baruga Layanan Aduan Masyarakat	Aduan	14.800,0	341,0				
1.0 10 01 06 2	10 00	Pengelolaan Konten dan Berita Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Konten/Berita	2.200,0	1.171,0				

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan(Ren) a Perangkat Daerah 1 tahun (n-1)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi		
					Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
1.0 10 01. 03 00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	% Layanan Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi berkualitas baik		100,0	80,0				
1.0 10 01. 03 00	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sengketa Informasi yang diselesaikan		100,0	117,0				
1.0 10 01. 03 00	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas PPID	Jumlah Peserta Bimtek PPID		548,0	50,0				
1.0 10 01. 03 00	Pengelolaan Informasi Publik	Jumlah Data Informasi Publik dari OPD		1.000,0	545,0				
1.0 10 01. 04 00	PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	% Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		100,0	50,0				
1.0 10 01. 04 00	Peningkatkan Sumber Daya Komunikasi	% Desiminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilakukan sesuai dengan Strategi komunikasi (STRAKOM)		100,0	50,0				
1.0 10 01. 04 00	Monitoring dan Evaluasi Penyeleenggaraan Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Dilingkatkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyeleenggaraan Komunikasi Publik		295,0	0,0				
1.0 10 01. 04 00	Monitoring dan Evaluasi Penyeleenggaraan Komunikasi Publik	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyeleenggaraan Komunikasi Publik		120,0	0,0				

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target Program dan Kegiatan(Renj a Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		
					Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	11=(10/4)
1.0 10 01. 04 00	Pelaksanaan Kermitraan Lembaga Media	Jumlah Mitra Media Dalam Peiaksanaan Publikasi	15,0	2,0				
1.0 10 01. 04 00	Literasi Media Sosial	Jumlah Peserta yang mengikuti Literasi Pengguna Media Sosial	414,0	0,0				
1.0 10 01. 04 00	Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pemanfaatan Komunikasi Publik	10,0	2,0				
10 01. 50 00	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>% Pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100,0</b>	<b>75,0</b>				
10 01. 50 003 00	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	215,0	69,0				
10 01. 50 005 00	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Pengbandaan	Jumlah ATK yang tersedia	419,0	65,0				
10 01. 50 008 00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamaan makan dan minum yang tersedia	400,0	50,0				
10 01. 50 010 00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	326,0	46,0				
10 01. 51 00 00	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				
10 01. 51 004 00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	5,0	1,0				
10 01. 51 006 00	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	22,0	20,0				
10 01. 51 009 00	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	138,0	16,0				
10 01. 51 010 00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	100,0	30,0				

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keleuaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan(Ren) a Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Target Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1)	Target Capaian Rasionalisasi Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi			
					Target	Target	Target			
1	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
10 01. 52 00	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100,0	100,0	100,0					
10 01. 52 002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	5,0	5,0	1,0					
10 01. 52 005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Renstra dan Perubahan yang disusun dan diterbitkan	10,0	10,0	1,0					
14 01. 01 006	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun dan dilaporkan	20,0	20,0	4,0					
14 01. 01 008	Sinkronisasi Antara Data Dengan Metadata	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	75,0	75,0	15,0					
		%Sistem data dan statistik yang terintegrasi	98,0	98,0	53,0					
		Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	90,0	90,0	50,0					
14 01. 01 006	Pengukuran Kapasitas Kelembagaan	Jumlah laporan hasil Pengukuran Kelembagaan	8,0	8,0	1,0					
14 01. 01 008	Sinkronisasi Antara Data Dengan Metadata	Jumlah Penyediaan Data Informasi yang terstruktur	10,0	10,0	3,0					

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan(Renj a Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Target Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keleuaran		Realisasi Tingkat Realisasi						
				Realisasi Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)							
1	2	3	4	Target	5	Target	6	Target	7			
14 01. 01 00	Pelaksanaan Pengumpulan Data OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi Statistik Sektor/ yang dikumpulkan	7,0	3,0								
15 01. 01 00	PROGRAM PEMANFAATAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI	% Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	80,0	50,0								
15 01. 01 002	Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihian insiden Keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihian atas terjadinya insiden Keamanan informasi	47,0	47,0								
15 01. 01 003	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihian di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Keamanan informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihian	500,0	70,0								
1 01. 01 005	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Jaringan Komunikasi Sandi	24,0	24,0								
06 01. 18 00	PROGRAM KERASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Peningkatan Jumlah kerjasama informasi aktif media massa	80,0	25,0								
06 01. 18 001	Pelayanan Publikasi Kegiatan Pemprov Sulsel	Jumlah Publikasi Berita	9,500,0	28.698,0								
06 01. 18 002	Publikasi Media Nasional	Jumlah kerja sama dengan media nasional	3,0	1,0								

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan(Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kejauaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)				Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		
				Target	Target	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Target	Target	Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Target
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10=(5+7+9)</b>	<b>11=(10/4)</b>
06.01.18.003	Penyiapan Bahan Informasi Media Cetak	jumlah advertorial	290,0	65,0						
		% Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%				80,0	80,0		90,0
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					100,0	100,0		100,0
		% Tindak Lanjut Pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	100%							
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi	100%				1,0	1,0		1,0
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aspirasi yang terkumpul	4500			86,0	86,0		500,0
		Monitoring Informasi dan penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi	12			4,0	4,0		4,0
		Pengelola Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Publik	6000			1.120,0	1.120,0		1.000,0
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pemanfaatan Komunikasi Publik	36			15.473,0	15.473,0		10.000,0

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target Program dan Kegiatan(Ren) a Perangkat Daerah (n-1)	Target Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1)	Target Realisasi Capaian Rasioialisasi Renstra (%)
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	10=(5+7+9)
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Publik	21		7,0	7,0	7,0	7,0
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Adveitorial / Jumlah Kerjasama Media Nasional	150		50,0	50,0	9,0	50,0
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase sengketa Informasi yang Diselesaikan	100%		50,0	50,0	50,0	50,0
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Pemanfaatan TIK Lingkup Pemerintah Prov.Sulsel	3		80,0	80,0	90,0	90,0
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan domain dan subdomain pada Pemprov Sulsel	3		2,05	2,05	3	3
	Penyeleenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwidth Pemerintah Prov.Sulsel	1700		3	3	1700	1700
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Pemerintah	Jumlah OPD Dalam Pengelolaan e-Government	53		53,0	53,0		
	Penyeleenggaraan Sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwidth Global dan Domestik Pemerintah Prov.Sulsel	1700		1.200,0	1.200,0		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan(Ren) a Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)		Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi	Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)		
				Target	Target			Target	Target	
1	2	3	4	6	86,0	86,0	8	7	9	10=(5+7+9)
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Eletronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dan dikelola	86						86	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah Daerah	Jumlah Bimtek Kompetensi TIK tang dilukti dan jumlah sumber Daya manusia yang meningkatkan kualitasnya dalam Bidang E-Government	14				9		14	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	4						4	
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	100%				80,0	80,0	80,0	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Data Statistik Sektoral	5				5,0	5,0	5,0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral								20,0	
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas SDM	54				18,0	18,0	15,0	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan(Renstra Perangkat Daerah s/d Perangkat Daerah (n-1)	Realisasi Capaian Program s/d Tahun Berjalan (n-1)	Target Realisasi Capaian Program s/d Tahun Berjalan (n-1)	Target Capaian Rasioanalasi Rensstra (%)
				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target Renstra Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Penyediaan Data Informasi Yang Terstruktur	50				16,0	16,0	4,0	
	Peningkatan Kapasitas Kelembangan Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembangan	9				4,0	4,0	4,0	
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Aplikasi Yang Dikembangkan	9				3,0	3,0	1,0	
	Penyelenggaran otorisasi statistik sektoral di daerah	Jumlah Kegiatan otorisasi statistik sektoral	10				1,0	1,0	5,0	
	Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Persentase komunikasi daerah yang memanfaatkan persandaan	80				50,0	50,0	60,0	
	Kejadian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Jumlah area penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	18				6,0	6,0	6,0	
	penetapan kebijakan tata keola keamanan informasi dan jaringan komunitas sandi pemerintah daerah provinsi	Jumlah Usaha rencana peraturan daerah terkait sistem manajemen keamanan informasi	1				1,0	1,0		
	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provisi	Jumlah aparat pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi/jumlah peserta penyelenggaraan forum komunikasi persandian daerah	15				5,0	5,0	5,0	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaihan Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan(Renj a Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaihan Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)		Realisasi Capaihan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Target Capaian Rasioalisasi Target Renstra (%)	
						Target	Target			Target	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik dan Non elektronik	Jumlah aplikasi keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah	6		2,0	2,0	2,0			
		Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Jumlah layanan keamanan informasi yang diterapkan	6		2,0	2,0	2,0			
		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	9		3,0	3,0	3,0			
		Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Entitas Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	3		3,0	3,0	3,0			
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		100,0	100,0	100,0	100,0			
			Perangkat ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik		100%				100,0		
			Persentase penurunan tamuan berdasarkan LHP		100%				100,0		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1)	Target Capaian Rasioalisaasi Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1)	Target Capaian Renstra (%)
					Target	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi			
					Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,0	2,0		2,0		
		Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah RKA dan DPA pokok dan perubahan yang disusun dan ditetapkan	12			4,0		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36			12,0		
		Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		% Pelaporan keuangan tepat waktu perangkat daerah	100			2,0		
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan ASN	3			12,0		
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	45			15,0		
		Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2			2,0		
		Pengadaan pakaiian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pakaiian dinas dan atribut kelengkapannya yang tersedia	100			100		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan)	Target Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-1)	Target Capaian Rasioalisasi Target Renstra (%)
			Target	Target	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi			
			4	5	6	7			
1	2	3	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai yang tersedia	5	5	5	5,0	
	Kegiatan administrasi umum Perangkat daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2		2,0	2,0		2,0	
		Penyediaan peralatan perlengkapan kantor		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	27				
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SkPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	210				
		Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3				
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan bantuan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan		Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional yang terpenuhi	60				
		Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3				
								1,0	
								21,0	
									21,0

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan(Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
		Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara 177	37,0	37,0			59,0	11=(10/4)

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan yaitu :

1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah yang menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 telah mencapai 78%;
2. Jumlah layanan media publikasi informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel pada tahun 2020 tercapai sebanyak 74 Media yang terdiri dari Media Elektronik, Media Cetak , Media Elektronik Televisi dan Media Elektronik Radio;
3. Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik, pada tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan masuk pada Kategori Cukup Informatif dengan nilai 72,55 dan memperoleh Piagam penghargaan;
4. Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi, pada implementasi egovernment aplikasi pemerintah harus terpadu dan terintegrasi. Tahun 2021 aplikasi pemerintahan yang terintegrasi sebesar 74%. Dengan sistem aplikasi yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi;
5. Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo SP Prov. Sulsel, pada tahun 2021 tercapai 97% dari seluruh unit kerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 52 OPD yang telah terhubung;
6. Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan tahun 2021 adalah sebesar 80%;
7. Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI), untuk mengukur Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI) menggunakan suatu aplikasi dengan tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009. Evaluasi dilaksanakan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2021 Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI) memperoleh nilai 25;
8. Layanan informasi dan komunikasi tahun 2021 mencapai 80%, layanan Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkualitas baik;

9. Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik. Tindak lanjut pengaduan masyarakat pada baruga layanan telah tercapai 100%. Semua aduan yang masuk telah ditindaklanjuti seluruhnya kepada pihak terkait;
10. Cakupan pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi mencapai 100%, dimana seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah terhubung dengan jaringan intra daerah;
11. Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral, pada tahun 2021 mencapai 50%, masih banyak data yang belum terkumpul diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran dari pihak terkait untuk mengumpul dan menginput data yang dibutuhkan;
12. Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian, pada tahun ini mencapai 50%. Terdiri dari Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Aset Informasi atau Sistem Elektronik, Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi, Implementasi dan Pengelolaan Sertifikat Elektronik Pemerintah Daerah dan Penyusunan Peraturan Tentang Tata Kelola/Manajemen dan Prosedur Teknis Operasional Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
13. Tahun 2021 persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon sebesar 87,71 % (Sumber BPS Prov. Sulsel) dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena telah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari sebagai media pencari informasi, melakukan interaksi, mendapatkan hiburan, mendukung dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terutama dalam era pandemic covid-19;
14. Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet tahun 2021 sebesar 59,69 % (Sumber BPS Prov. Sulsel) dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena masa pandemic covid-19 dengan melakukan kegiatan pendidikan, ekonomi, kesehatan secara online dilakukan dan banyaknya daerah yang terpencil tercoverege sehingga akses internet wilayahnya lebih meluas;
15. Persentase Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi tahun 2021 sebesar 31,44 % (Sumber BPS Prov. Sulsel) sedikit mengalami peningkatan karena harga komputer sepenuhnya sudah terjangkau secara ekonomi, kebutuhan dalam tuntutan pekerjaan didalam rumah tangga dan adanya tuntutan penggunaan komputer dalam proses belajar mengajar.

Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan hasil pengukuran indikator kinerja dapat dilihat pada tabel T-C.30 sebagai berikut :

**Tabel TC. 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan**

Kode Indikator	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi
		Tahun -n2	Tahun -n1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun-n1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IKU							10
	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	78%	85%	89%	95%	78%	85%	89%
	Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel	44	46	48	50	44	46	48
	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	72.50	73.00	73.50	74.00	72.50	73.00	73.50
	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	70%	75%	78%	80%	70%	75%	78%
	Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfotik Prov. Sulsel	97.82%	100%	100%	100%	97.82%	100%	100%
	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	80%	90%	100%	100%	80%	90%	100%
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	25%	30%	35%	40%	25%	33%	35%
	SDGS							
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	57%	61%	61%	65%	57%	61%	65%
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	65.14%	61%	65%	68%	65.14%	61%	65%
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	60	65	70	75	60	65	70
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	68	73	78	82	68	73	78
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	49.59	58	60	65	49.59	58	60
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	60	65	75	78	60	65	75
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	52	62	68	70	52	62	68
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Indikator	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi
		Tahun-n2	Tahun -n1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun-n1	Tahun n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IKK								
	Persentase layanan informasi dan komunikasi	80%	90%	100%	100%	80%	90%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pemanfaatan TIK lingkup pemerintah daerah provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektor	60%	80%	100%	100%	60%	80%	100%	100%
	Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	35%	50%	70%	80%	35%	50%	70%	80%

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan OPD**

Secara umum kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD. Namun demikian, masih terdapat isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan terkait kinerja pelayanan Perangkat Daerah yaitu :

- a. Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Keterbukaan Informasi yang belum sepenuhnya terlaksana;
- c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- d. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik;
- e. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah persandian;
- f. Perkembangan Teknologi Informasi;
- g. Program satu data Indonesia.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika**

#### **Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah:

- a. Perlunya peningkatan Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Perlunya peningkatan Keterbukaan Informasi;
- c. Perlunya Peningkatan Nilai Indeks SPBE;
- d. Perlunya Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik;
- e. Perlunya Peningkatan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah persandian;
- f. Perlunya Peningkatan Perkembangan Teknologi Informasi;
- g. Perlunya Peningkatan Pelaksanaan Program satu data Indonesia.

### **2.3.3 Dampak isu-isu strategis terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Capaian Program Nasional**

Dampak yang ditumbulkan dari adanya isu-isu strategis bidang kominfo, yaitu kurang maksimalnya pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui implementasi e-goverment maupun dalam menciptakan kesadaran masyarakat

akan pentingnya menggunakan Teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa melalui penciptaan masyarakat informasi Indonesia.

#### **2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah**

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat;
2. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat;
3. Penguatan peran PPID utama dan PPID pembantu dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikat nasional dalam bidang TIK;
5. Meningkatnya kebutuhan bandwith terkait peningkatan kebutuhan akses sistem dan aplikasi untuk mempercepat pelayanan publik;
6. Trend pelayanan urusan pemerintahan yang berbasis layanan teknologi informasi dan telekomunikasi;
7. Belum terintegrasinya data statistik sektoral;
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

Sedangkan peluang yang bisa diambil Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Telah tersusunnya master plan IT Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Adanya regulasi yang mendukung pengembangan teknologi informatika dan komunikasi;
3. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap penerapan e-government;
4. Terlaksananya bimtek SPSE yang berkelanjutan;
5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPBE;
6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan publik;
7. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
8. Pemanfaatan media massa, baik media nasional, media cetak maupun elektronik dan online untuk menyampaikan hasil kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Semakin majunya teknologi keamanan system informasi dalam penanganan tindak kejahatan cyber (cyber crime);
10. Optimalisasi Big Data sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan;
11. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo SP dalam melaksanakan tugas.

### **2.3.5 Formulasi isu-isu penting / rekomendasi SDGS**

Dari penjabaran isu – isu penting di atas, dapat direkomendasikan hal –halsebagai berikut sebagai alternatif /upaya pemecahan masalah, yaitu :

1. Perlunya peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat;
2. Perlunya peningkatan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat;
3. Perlunya penguatan peran PPID utama dan PPID pembantu dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
4. Perlunya peningkatan SDM agar memiliki sertifikat nasional dalam bidang TIK;
5. Perlunya meningkatkan bandwith terkait peningkatan kebutuhan akses system dan aplikasi untuk mempercepat pelayanan publik;
6. Perlunya integrasi data statistik sektoral;
7. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

Program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan SDGS, yaitu :

#### **1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

##### **Kegiatan :**

- a. Pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah

##### **Sub Kegiatan :**

- a) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- b) Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- c) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE.

#### **2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

##### **Kegiatan :**

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

##### **Provinsi Sub Kegiatan :**

- a) Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- b) Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik

- daerah yang terintegrasi;
- c) Membangun metadata statistik sektoral;
  - d) Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
  - e) Pengembangan infrastruktur;
  - f) Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capainnya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 5 Program, 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

Berdasarkan tabel T-C. 31 maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2023 lebih tinggi dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 15.644.278.289,- dengan alasan :

- 1. Adanya perubahan besaran tunjangan Fungsional, baik Fungsional Kehumasan maupun Fungsional Sandimen;
- 2. Penggunaan peralatan komputer, kursi, meja kerja dan penyimpanan buku pustakawan dibutuhkan karena sebagian peralatan yang ada di kategorikan peralatan yang sudah lama/rusak sehingga dapat menghambat pekerjaan;
- 3. Kebutuhan untuk penggunaan alat tulis kantor, makan minum rapat, maupun perjalanan dinas diperlukan untuk menunjang progres kerja eselon II, eselon III, eselon IV maupun pelaksana;
- 4. Kebutuhan anggaran yang bertambah karena naiknya harga bahan bakar maupun biaya pemeliharaan kendaraan, dan anggaran penunjang pada komisi informasi provinsi sulawesi selatan di alihkan ke sub bagian umum kepegawaian dan hukum serta bertambahnya kendaraan yang dari biro aset ke dinas kominfo berupa roda 4.

## **B. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2023 lebih tinggi dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 8.788.169.986,-

Seiring dengan tuntutan transformasi digital dan perubahan paradigma pemerintahan dengan semakin massif dan urgent-nya penggunaan SPBE, maka dibutuhkan Tim IT yang cukup secara jumlah dengan mendapatkan pendapatan yang memadai. Saat ini pembangunan aplikasi dan maintenance-nya hanya dilakukan oleh 6 (enam) orang tenaga ahli dan melayani hamper seluruh kebutuhan SPBE OPD. Begitu pula dengan jaringan intra pemerintah yang hanya ditangani oleh (empat) orang Tim IT. Olehnya itu, sangat dibutuhkan tambahan personil dan juga perbaikan penghasilan, dimana rata-rata penghasilan Tenaga Ahli IT berkisar 3,5 jt/bulan (hampir setara dengan tenaga outsourcing kebersihan dan supir).

Sebagai upaya untuk memudahkan Gubernur mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia, telah dikembangkan dashboard pimpinan. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi prioritas yang perlu menjadi perhatian yaitu :

- Bandwidth;
- Belanja alat studio, pemancar studio, pemeliharaan server, FO, adaptor kabel konektor;
- Belanja modal perlatan jaringan (wireless/acces point dan kelengkapan);
- Lisensi akun mobile android ios anti virus, security web;
- Pengembangan aplikasi dan Probis;
- Koordinasi dan monitoring SPBE.

## **C. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2023 lebih tinggi dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 34.953.430.160,-

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di daerah sehingga membutuhkan anggaran yang lebih maksimal. Pada tahun 2023 ada beberapa hal yang menjadi prioritas yang perlu menjadi perhatian yaitu :

- Pengelolaan media komunikasi publik;
- Layanan hubungan media;
- Kerjasama konten creator profesional.

#### **D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2023 lebih tinggi dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 749.998.612,-

Sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang satu data untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi selatan. Saat ini pembangunan aplikasi satu data sangat diperlukan yang belum terintegrasi dengan kabupaten kota dan masih kurangnya fasilitas. Olehnya itu, sangat dibutuhkan tambahan anggaran untuk membantu penyediaan data statistik sektoral.

Monitoring dan evaluasi yang rutin dilaksanakan ke daerah-daerah dan organissai Perangkat daerah provinsi Sulawesi selatan sebagai bentuk pembinaan dan menyamakan persepsi terhadap validata se kabupaten kota untuk peningkatan data yang terintegrasi. diperlukan pertemuan-pertemuan koordinatif dengan setiap PD dan Kab/Kota yang integratif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penganggaran perjalanan dinas, rapat-rapat koordinasi, bimbingan teknis sangat diperlukan.

Sebagai upaya untuk memudahkan gubernur mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia, telah dikembangkan dashboard pimpinan. Dengan Aplikasi satu data diharapkan dapat memfasilitasi pimpinan dan PD lainnya untuk menghasilkan keputusan yang berdasarkan data yang terhimpun.

#### **E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Hasil analisis kebutuhan RKPD tahun 2023 lebih tinggi dari rancangan awal dengan total kebutuhan anggaran Rp. 799.993.952,-

1. Belanja Kegiatan pelatihan teknis diperlukan guna peningkatan kompetensi SDM Sandi dan Siber terkait Pelatihan Penanggulangan Insiden Siber dan Pelatihan Keamanan SPBE;
2. Kegiatan Literasi keamanan informasi untuk meningkatkan Awareness Keamanan Data Pribadi bagi masyarakat;
3. Perlunya sarana dan prasarana untuk penguatan operasional SULSELPROV- CSIRT yang telah di launching pada tahun 2021;

4. Perlunya tenaga ahli untuk pengamanan informasi.

Penjabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel T-C. 31 berikut ini:

TC. 31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Kebutuhan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.02	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar											
1.02.10	Komunikasi dan Informatika											
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian											
2.16.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
2.16.02.1.0	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi											
2.16.02.1.0.1	Monitoring Opsi dan Aspirasi Publik	Makassar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Prov. Sulsel	2 Dokumen	34.923.430.160,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Makassar	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4 Laporan	32.492.855.950,00		
2.16.02.1.0.2	Monitoring Opsi dan Aspirasi Publik	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	337.000.000,00	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	750.000.000,00		
2.16.02.1.0.3	Monitoring Informasi dan penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	522.016.880,00	Monitoring Informasi dan penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	550.000.000,00		
2.16.02.1.0.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	597.016.780,00	Pengelola Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	500.000.000,00		
2.16.02.1.0.5	Pengajuan Media Komunikasi Publik	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengajuan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	12.938.776.000,00	Pengajuan Media Komunikasi Publik	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengajuan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	10.655.780.650,00		
2.16.02.1.0.6	Pelayanan Informasi Publik	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	7.711.968.900,00	Pelayanan Informasi Publik	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	8.837.075.300,00		
2.16.02.1.0.7	Layanan Hubungan Media	Makassar	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	11.346.922.900,00	Layanan Hubungan Media	Makassar	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	7.700.000.000,00		
2.16.02.1.0.11	Pengurutan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengurutan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 Dokumen	1.474.697.700,00	Pengurutan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengurutan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 Dokumen	3.500.000.000,00		

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	
											1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Makassar	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3,0	8.038.171.374,00	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Makassar	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	3,0	15.220.985.812,00		
2.16.03.1.0	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Didapatkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan domain dan subdomain pada Pemprov Sulsel	1 Laporan	6.012.010.232,00	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Didapatkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan domain dan subdomain pada Pemprov Sulsel	1 Laporan	9.621.750.000,00		
2.16.03.1.0	Penerjemahan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	54 Unit	6.012.010.232,00	Penerjemahan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	54 Unit	9.621.750.000,00		
2.16.03.1.0	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Pemerintah	Makassar	Jumlah OPD Dalam Pengelolaan e-Government	54 OPD	2.026.161.142,00	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Pemerintah	Makassar	Jumlah OPD Dalam Pengelolaan e-Government	54 OPD	5.599.235.812,00		
2.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Makassar	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	76 Unit	293.674.650,00	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Makassar	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	76 Unit	424.000.000,00		
2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.131.075.452,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.633.224.000,00		
2.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	2 Dokumen	601.411.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	2 Dokumen	615.160.000,00		
2.20.02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Makassar	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	100%	749.998.612,00	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Makassar	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	100%	1.926.851.812,00		
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	749.998.612,00	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	1.926.851.812,00		
1.01	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	53 Dokumen	199.998.500,00	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	53 Dokumen	464.684.300,00		
1.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Terintegrasi	Makassar	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Terintegrasi	17 Orang	100.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Terintegrasi	Makassar	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Terintegrasi	17 Orang	131.046.412,00		
1.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Makassar	Jumlah Metadata Sektoral yang Dihimpun	13 Dokumen	124.998.800,00	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Makassar	Jumlah Metadata Sektoral yang Dihimpun	13 Dokumen	334.199.100,00		
1.04	Peningkatan Kapasitas Kelembangan Statistik Sektoral	Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	159 Orang	149.998.700,00	Peningkatan Kapasitas Kelembangan Statistik Sektoral	Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	159 Orang	242.136.940,00		
1.05	Pengembangan Infrastruktur	Makassar	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	99.998.812,00	Pengembangan Infrastruktur	Makassar	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	567.330.260,00		

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	
											1	2
1	2.20.2.1.0 Penyelenggaraan, ottresiasi statistik sektoral di daerah	Makassar	Jumlah data Statistik Sektorial yang Dihimpun	5 Dokumen	74.939.900.00	Penyelenggaraan analisis statistik sektoral di daerah	Makassar	Jumlah data Statistik Sektorial yang Dihimpun	5 Dokumen	197.454.600,00		
2.21.02	Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Makassar	Persentase Komunikasi Datarah Yang Memantaukan Persandian	60 %	799.993.952,00	Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Makassar	Persentase Komunikasi Daerah Yang Memantaukan Persandian	60 %	5.828.358.400,00		
2.21.02.1.0	Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Makassar	Jumlah area penyelenggaraan persandian persiduan untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	6 Area	642.086.752,00	Kegiatan Penyelenggaraan persandian persiduan untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Makassar	Jumlah area penyelenggaraan persiduan untuk pengamanan informasi provinsi	6 Area	4.720.000.000,00		
1	2.21.02.1.0 Pelaksanaan analisa kebutuhan dan penyelehan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Makassar	Jumlah Laporan Analisis Keamanan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	95.799.800,00	Pelaksanaan analisa kebutuhan dan penyelehan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Makassar	Jumlah Laporan Analisis Keamanan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	699.000.000,00		
1.02	2.21.02.1.0 Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan Non elektronik	Makassar	Jumlah Laporan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	278.169.800,00	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan Non elektronik	Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	974.000.000,00		
1.03	2.21.02.1.0 Pengembalaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan Non elektronik	Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	47 Perangkat Daerah	268.117.152,00	Pengembalaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan Non elektronik	Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	47 Perangkat Daerah	3.048.000.000,00		
1.04	2.21.02.1.0 Kegiatan layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	3 Jenis	157.907.200,00	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar perangkat Daerah	3 Jenis	1.108.358.400,00		
2	2.21.02.1.0 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	47 Perangkat Daerah	157.907.200,00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	47 Perangkat Daerah	1.108.358.400,00		
2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Persentase Realisasi Kegiatan Kegiatan Perangkat Daerah	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%			
2.16.01		Makassar	Perangkat ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	100%	15.481.480.289,00		Makassar	Perangkat ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	100%	17.080.556.044,00		
		Makassar	Persentase penurunan tamuan berdasarkan LHP	100%			Makassar	Persentase penurunan tamuan berdasarkan LHP	100%			
2.16.01.1.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	349.296.100,00	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	630.000.000,00		
2.16.01.1.01	Fenyusian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	319.699.700,00	Fenyusian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	580.000.000,00		

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Kebutuhan	Hasil Analisis Kebutuhan	
											Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.21.02.1.0 1.06	Penyelenggaraan analisis statistik sektorial di daerah	Makassar	Jumlah data Statistik Sektorial yang Dihimpun	5 Dokumen	74.999.800,00 Penyelenggaraan analisis statistik sektorial di daerah		Makassar	Jumlah data Statistik Sektorial yang Dihimpun	5 Dokumen	187.454.800,00		
2.21.02	Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Makassar	<b>Percentase Komunikasi Daerah Yang Memanfaatkan Persandian</b>	<b>60 %</b>	<b>799.993.952,00 Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi</b>		<b>Makassar</b>	<b>Percentase Komunikasi Daerah yang Memanfaatkan Persandian</b>	<b>60 %</b>	<b>5.828.358.400,00</b>		
2.21.02.1.0 1.02	Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Makassar	Jumlah area penyelenggaraan persandian pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	6 Area	642.086.752,00 Kegiatan Penyelenggaraan persandian pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi		Makassar	Jumlah area penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	6 Area	4.720.000.000,00		
2.21.02.1.0 1.02	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan perolehan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Makassar	Jumlah Laporan Analisis Keamanan dan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	95.719.800,00 Pelaksanaan analisis kebutuhan dan perolehan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi		Makassar	Jumlah Laporan Analisis Keamanan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	688.000.000,00		
2.21.02.1.0 1.03	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi berbasis elektronik dan Non elektronik	Makassar	Jumlah Laporan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	278.169.800,00 Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi berbasis elektronik dan Non elektronik		Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	974.000.000,00		
2.21.02.1.0 1.04	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Makassar	Jumlah perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	47 Perangkat Daerah	260.117.152,00 Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi		Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	47 Perangkat Daerah	3.045.000.000,00		
2.21.02.1.0 2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar perangkat Daerah	3 Jenis	157.907.200,00 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah		Makassar	Jumlah layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar perangkat Daerah	3 Jenis	1.108.358.400,00		
2.21.02.1.0 2.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	47 Perangkat Daerah	157.907.200,00 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	47 Perangkat Daerah	1.108.358.400,00		
2.16.01	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	<b>Percentase Realisasi Kegiatan Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Makassar</b>	<b>Percentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>17.080.556.044,00</b>		
		Makassar	Percentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	Perangkat ASN perangkat daerah yang berkinerja kategori baik dan sangat baik	15.491.480.269,00	Makassar	Percentase ASN perangkat daerah yang berkinerja kategori baik dan sangat baik	100%	17.080.556.044,00		
		Makassar	Percentase penurunan tamatan berdasarkan LHP	100%			Makassar	Percentase penurunan tamuan berdasarkan LHP	100%			
2.16.01.1.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	349.296.100,00 Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Makassar	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	630.000.000,00		
2.16.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	319.949.700,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	580.000.000,00		

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Kebutuhan	Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.6.01.1.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12 Laporan	29.296.400,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12 Laporan	50.000.000,00													
2.6.01.1.02 Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100%	11.613.193.165,00	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	100%	13.255.600.000,00														
2.6.01.1.02 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	11.363.193.165,00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	12.800.000.000,00														
2.6.01.1.02 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 Laporan	250.000.000,00	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 Laporan	455.600.000,00														
2.6.01.1.05 Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	92.000.000,00	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	302.800.000,00														
X.00.01.1.0 Pengadaan pakaiian dinas beserta atribut kelingkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelingkapannya	3 Paket	0,00	Pengadaan pakaiian dinas beserta atribut kelingkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelingkapannya	3 Paket	152.800.000,00														
X.00.01.1.0 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	92.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	150.000.000,00														
X.00.01.1.0 Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	2.129.952.874,00	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	1.274.335.000,00														
X.00.01.1.0 Penyelenggaran perilaku dan konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Paket Perilaku dan Penelitian Konsultasi yang Diselidiki	38 Unit	116.607.250,00	Penyelenggaran perilaku dan penelitian konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Paket Perilaku dan Penelitian Konsultasi yang Diselidiki	38 Unit	193.760.000,00														
X.00.01.1.0 Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	2.013.345.624,00	Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	1.080.775.000,00														
X.00.01.1.0 Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Makassar	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.307.036.150,00	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Makassar	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.617.621.044,00														
X.00.01.1.0 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pakai kendaraan perangkat dinas atau kendaraan	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dikelola/Direhabilitasi	23 Unit	1.136.998.400,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pakai kendaraan perangkat dinas atau kendaraan	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dikelola/Direhabilitasi	23 Unit	1.073.643.272,00														
X.00.01.1.0 Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Makassar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	40.697.500,00	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Makassar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	31.277.772,00														
X.00.01.1.0 Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	59 Unit	129.642.250,00	Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	59 Unit	232.700.000,00														

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam hal usulan Program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2023, tidak terdapat usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

### **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2023 akan melanjutkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional untuk memantapkan pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif. Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. RKP tahun 2023 mencakup 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Arah Kebijakan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Arah kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- a) Tujuan Strategis
  1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
  2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
  3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.
- b) Sasaran Strategis
  1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
  2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
  3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
  4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;

5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 khususnya pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan. Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Karena merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sasaran harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan tujuan

perangkat daerah sendiri yang terkait dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Adapun rumusan tujuan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan pada Renstra 2018-2023 yang ingin dicapai adalah: “Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)”.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis, yang berfokus kepada tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi. Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Meningkatnya Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
5. Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel.

Berdasarkan dari tujuan dan sasaran, output capaian kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - Persentase layanan informasi dan komunikasi publik dengan jumlah capaian yang ingin dicapai sebesar 90%
  - Persentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara elektronik dengan jumlah capaian yang ingin dicapai sebesar 100%.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  
Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan jumlah capaian yang ingin dicapai sebesar 2,90.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  
Cakupan ketersediaan data statistik sektoral dengan jumlah capaian yang ingin dicapai sebesar 80%.
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi  
Persentase komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian dengan

jumlah capaian yang ingin dicapai sebesar 50%.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah dengan jumlah capaian yang ingin dicapai sebesar 100%
- Persentase ASN perangkat daerah berkategori baik dan sangat baik dengan jumlah capaian yang ingin dicapai sebesar 100%
- Persentase penurunan temuan LHP dengan jumlah capaian yang ingin dicapai sebesar 100%.

**Tabel TC. 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Rancangan Awal RKP'D	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Kebutuhan	
1			2	3	4	5	6	
1.02	<b>Urusan Wajib Non Perilayanan Dasar</b>							
1.02.1.01	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</b>							
2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>							
2.16.02.1.01.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Makassar		% Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	%	90%		
2.16.02.1.01.02	<b>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</b>	Makassar		% Tingkat Larut Pengedegan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	%	100%		
2.16.02.1.01.03	<b>Monitoring Informasi dan penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah</b>	Makassar		Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Prov. Sulsel	Makassar	2 Dokumen	34,668,955,720,00	
2.16.02.1.01.04	<b>Pengembangan Kultur dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</b>	Makassar		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Makassar	4 Dokumen	487,630,600,00	
2.16.02.1.01.05	<b>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>	Makassar		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Makassar	4 Dokumen	793,788,560,00	
2.16.02.1.01.06	<b>Pelayanan Informasi Publik</b>	Makassar		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Makassar	4 Dokumen	856,372,550,00	
2.16.02.1.01.07	<b>Layanan Hubungan Media</b>	Makassar		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Makassar	4 Dokumen	13,969,733,000,00	
2.16.02.1.01.11	<b>Pengukuran Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah</b>	Makassar		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Makassar	3 Layanan	7,789,953,100,00	
2.16.03	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	Makassar		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Makassar	3.0	8,117,095,372,00	
2.16.03.1.01	<b>Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	Makassar		Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan domain dan subdomain pada Pemprov Sulsel	Makassar	1 Laporan	6,092,660,232,00	
2.16.03.1.03	<b>Pembangunan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</b>	Makassar		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Makassar	54 Unit	6,092,660,232,00	
2.16.03.1.02	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Pemerintah</b>	Makassar		Jumlah OPD Dalam Pengelolaan e-Government	Makassar	54 OPD	2,024,435,140,00	
2.16.03.1.02.07	<b>Pembangunan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	Makassar		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Makassar	76 Unit	376,099,000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Kebutuhan		
1	2	3	4	5	6			
2.16.03.1.02.10	Penembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Makassar	1 Dokumen	950,524,740,00		
2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ecosystem SPBE	Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelenggaran SPBE	Makassar	2 Dokumen	697,711,400,00		
2.20.02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Makassar	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	Makassar	100%	1,481,643,912,00		
2.20.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Makassar	5 Laporan	1,481,643,912,00		
2.20.02.1.01.01	<koordinasi dan Sinergisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinergisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Makassar	53 Dokumen	341,867,000,00		
2.20.02.1.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Makassar	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Makassar	17 Orang	471,999,800,00		
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Makassar	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Makassar	13 Dokumen	104,140,200,00		
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembangan Statistik Sektoral	Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Makassar	159 Orang	248,272,600,00		
2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Makassar	Jumlah Infrastruktur Statistik	Makassar	1 Unit	237,242,512,00		
2.20.02.1.01.06	Pengembangan otorisasi statistik sektoral di daerah	Makassar	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Makassar	5 Dokumen	78,121,800,00		
2.21.02	Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Makassar	Persentase Komunikasi Daerah Yang Memanfaatkan Persandian	Makassar	60 %	933,352,900,00		
2.21.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Makassar	Jumlah area penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Makassar	6 Area	766,961,400,00		
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya komunitas informasi pemerintah daerah provinsi	Makassar	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Makassar	2 Laporan	277,293,290,00		
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi berbasis elektronik dan Non Elektronik	Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Makassar	12 Laporan	254,863,100,00		
2.21.02.1.01.04	Penyedia layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Makassar	47 Perangkat Daerah	234,805,100,00		
2.21.02.1.02	Kegiatan Penelitian Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar perangkat Daerah	Makassar	3 Jenis	166,391,500,00		
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Makassar	47 Perangkat Daerah	166,391,500,00		
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Makassar	100%			
		Makassar	Perangkat ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	Makassar	100%	17,306,275,500,00		

No.	Rancangan Awal RKPD	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
					1	2	3	
			Makassar	Persentase peraturan tamu berdasarkan LHP				
2.16.01.1.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	100%			
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	6 Dokumen			413,143,800.00
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Makassar	12 Laporan			36,862,100.00
2.16.01.1.02	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Makassar	100%			11,613,226,761.00
2.16.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	90 Orang/ Bulan			11,363,226,761.00
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan akunansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akunansi SKPD	Makassar	15 Laporan			250,000,000.00
2.16.01.1.05	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	2 Laporan			187,024,400.00
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan pakaiannya dinas beserta aribut ke lengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaiannya dinas Beserta Atribut Kelebihan	Makassar	3 Paket			67,050,000.00
X.XX.01.1.05.03	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Perdasarkan Tugas dan Fungsinya yang Mengikuti Pelatihan dan Pelatihan	Makassar	5 Orang			119,974,400.00
X.XX.01.1.06	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Makassar	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	2 Laporan			3,375,196,815.00
X.XX.01.1.06.02	Penyelenggaraan peralatan perlengkapan kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	38 Unit			1.201,351,250.00
X.XX.01.1.06.03	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	10 Laporan			2,173,805,565.00
X.XX.01.1.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah perumahan pemerintah daerah	Makassar	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perumahan	Makassar	3 Laporan			1,680,821,625.00
X.XX.01.1.09.01	Penyelidikan jasa bermotor, daya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kendaraan atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar	23 Unit			1.444,714,375.00
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Makassar	Jumlah gedung kantor yang dibelihara	Unit	1			71,417,900.00
X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Jenis	59			164,689,750.00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Penyusunan rencana program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 guna mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah. Hasil rumusan tujuan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, ada beberapa program dan kegiatan yang mendukung Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, kegiatan ;
  - a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan :
    - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  - b. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan :
    - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
    - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
    - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, kegiatan :
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, sub kegiatan :
    - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
    - Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
    - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
    - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
    - Pelayanan Informasi Publik
    - Layanan Hubungan Media
    - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi, sub kegiatan :
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
  - Membangun Metadata Statistik Sektoral
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  - Pengembangan Infrastruktur
  - Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, kegiatan :
- a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi, sub kegiatan :
    - Penetapanan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi
    - Pelaksanaan analisis kebutuhan dan penegelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah provisi
    - Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik dan Non elektronik
    - Penyedia layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi.
  - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah, sub kegiatan:
    - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil penggerjaan Tabel T-C. 33, yaitu sebagai berikut :

**Tabel TC. 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.02	Urusan Walib Non Pelayanan Dasar	2	3	4	5	6	7	9
1.02.10	Komunikasi dan Informatika							10
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian							
	% Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Makassar	90%					
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	% Tingkat Lanjut Pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	Makassar	100%				
2.16.02.1.01.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Prov. Sulsel	Makassar	2 Dokumen				
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Makassar	4 Dokumen				
2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Makassar	4 Dokumen				
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Pengembangan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Konten dan Pengembangan Media Komunikasi Publik	Makassar	4 Dokumen				
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Makassar	4 Dokumen				
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Makassar	4 Dokumen				
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Dokumen Hubungan Media	Makassar	3 Layanan				
2.16.02.1.01.11	Pengurusan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengurusan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Makassar	4 Dokumen				
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Makassar	3.0				
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan domain dan subdomain pada Pemprov Sulsel	Makassar	1 Laporan				
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Makassar	54 Unit				
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah OPD Dalam Pengelolaan e-Government	Makassar	54 OPD				
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Makassar	76 Unit				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana			
2	3	4	5	6	7	9	10		
2.16.03.1.02.10	Peningkatan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Peleksaanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Makassar	1 Dokumen	950,624,740,00				
2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyeleenggaraan SPBE	Makassar	2 Dokumen	697.711.400,00				
2.20.02	Program penyeleenggaraan statistik sektoral	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	Makassar	100%	1.481.643.912,00				
2.20.02.1.01	Kegiatan Penyeleenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinergisasi	Jumlah Laporan Penyeleenggaraan Statistik Sektoral	Makassar	5 Laporan	1.481.643.912,00				
2.20.02.1.01.01	Peningkatan klasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sincronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Makassar	53 Dokumen	341.867.000,00				
2.20.02.1.01.02	Membangun Mandatua Statistik Sektoral	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Makassar	17 Orang	471.999.300,00				
2.20.02.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembangan Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Makassar	13 Dokumen	104.140.200,00				
2.20.02.1.01.04	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dan BPS	Makassar	159 Orang	248.272.600,00				
2.20.02.1.01.05	Penyeleenggaraan otorsasi statistik sektoral di daerah	Jumlah Infrastruktur Statistik	Makassar	1 Unit	237.242.512,00				
2.20.02.1.01.06	Program penyeleenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Makassar	5 Dokumen	78.121.800,00				
2.21.02.1.01	Kegiatan Penyeleenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah provinsi	Persentase Komunikasi Daerah Yang Memanfaatkan Persandian	Makassar	60 %	933.352.900,00				
2.21.02.1.01.01	pelaksanaan analisis ketulian dan penelitian sumber daya, keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi	Jumlah arasa penyeleenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Makassar	6 Area	766.961.400,00				
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik	Jumlah Laporan Analisis Ketulian dan Pengelolaan Sumber Daya, Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Makassar	2 Laporan	277.293.200,00				
2.21.02.1.01.03	Penyeleenggaraan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Makassar	12 Laporan	254.863.100,00				
2.21.02.1.01.04	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Jumlah Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar perangkat Daerah	Makassar	3 Jenis	166.391.500,00				
2.21.02.1.02	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Makassar	47 Perangkat Daerah	234.805.100,00				
2.21.02.1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Makassar	100%	17.306.275.501,00				
2.16.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Percentase perurunan tamuan berdasarkan LHP	Makassar	100%					
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan Penanggulangan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	2 Laporan	450.005.900,00				
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	6 Dokumen	413.143.800,00				
		Jumlah Laporan	Makassar	12 Laporan	36.862.100,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
2	3	4	5	6	7	9	10		
2.16.01.1.02	<b>Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan ASN</b>	Makassar	100%	11.613.226.761,00				
2.16.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	90 Orang/ Bulan	11.363.226.761,00				
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	15 Laporan	250.000.000,00				
2.16.01.1.05	<b>Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Makassar	2 Laporan	187.024.400,00				
2.16.01.1.05.02	Pengadaan paket dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Paket Dinias Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	3 Paket	67.350.000,00				
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Makassar	5 Orang	119.974.400,00				
2.16.01.1.06	<b>Kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Makassar	2 Laporan	3.375.196.815,00				
2.16.01.1.06.02	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	38 Unit	1.201.391.250,00				
2.16.01.1.06.09	Penyeleenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	10 Laporan	2.173.805.565,00				
2.16.01.1.09	<b>Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Makassar	3 Laporan	1.680.821.625,00				
2.16.01.1.09.01	Penyejaian jasa, pemeliharaan, biaya peneliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dibayarkan Pajaknya	Makassar	23 Unit	1.444.714.375,00				
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeleihara/Direhabilitasi	Makassar	1 Unit	71.417.500,00				
2.16.01.1.09.11	Perenoviran dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeleihara/Direhabilitasi	Makassar	59 Unit	164.689.750,00				

## **BAB V** **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2023 berisi rancangan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2023.

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. **Catatan Penting**

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023. Prioritas program/kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap program/kegiatan/sub Kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

b. **Kaidah Pelaksanaan**

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyaratdokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus di kedepankan.

c. **Rencana Tindak lanjut**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran Perangkat Daerah tahun 2023. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

